

ABSTRAK

Tanah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan jaminan kepastian hukum atas kepemilikannya. Untuk itu, Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur mekanisme penerbitan sertifikat hak atas tanah. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penerbitan sertifikat ganda, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis melalui studi kepustakaan untuk mengkaji legalitas dan penyelesaian sertifikat ganda dalam perspektif Hukum Administrasi Negara.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa sertifikat ganda bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (AUPB) dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme administratif di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan, apabila perlu, melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem administrasi pertanahan untuk mencegah terulangnya penerbitan sertifikat ganda, sekaligus memberikan kontribusi terhadap terciptanya kepastian hukum di bidang pertanahan di Indonesia.

Kata kunci : Sertifikat Ganda, Hukum Administrasi Negara, Kepastian Hukum

ABSTRACT

Land plays a crucial role in people's lives, thus requiring legal certainty regarding its ownership. To achieve this, the Government, through Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA) and Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration, regulates the mechanism for issuing land ownership certificates. However, in practice, the issuance of dual certificates often occurs, leading to legal uncertainty and contradicting the principles of good governance as stipulated in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration.

The research method used is normative legal research with a statute approach and conceptual approach. The data employed consist of primary and secondary legal materials analyzed through a literature study to examine the legality and resolution of duplicate certificates from the perspective of Administrative Law.

The results of this study show that dual certificates violate the principles of good governance (AUPB) and create legal uncertainty. The resolution is carried out through administrative mechanisms at the National Land Agency (BPN) and, if necessary, through lawsuits at the Administrative Court (PTUN). This study recommends strengthening the land administration system to prevent the recurrence of dual certificate issuance, thereby contributing to the establishment of legal certainty in the land sector in Indonesia.

Keywords: *Dual Certificates, State Administrative Law, Legal Certainty*